

BAB IV  
LATAR BELAKANG YANG MENDORONG JEPANG DALAM  
HUBUNGANNYA DENGAN REPUBLIK INDONESIA  
1958 – 1966

Politik dari suatu Negara, dari satu sisi, tidak berbeda dengan tingkah laku manusia secara individu kepada satu obyek tertentu didorong oleh kepentingan bervariasi yang melatarbelakangi tingkah laku tersebut, maka politik suatu Negara terhadap Negara lain juga didorong oleh kepentingan bervariasi yang melatarbelakangi politik tersebut. Namun, latar belakang politik suatu Negara terhadap Negara lain memiliki suatu tekanan yang berbeda – beda menurut kepentingan nasionalnya.

Setelah merdeka kembali, Jepang berusaha menormalisir kembali hubungan internasionalnya yang telah terputus beberapa waktu, termasuk dengan Indonesia (dulu ‘Hindia Belanda’). Dalam hubungan internasional, setiap Negara pada hakikatnya mendasarkan diri pada kepentingan nasionalnya masing – masing. Hubungan Republik Indonesia – Jepang merupakan tipe hubungan yang dapat dikatakan ‘khas’, karena merupakan hubungan akrab dua Negara dengan ideology berlainan pada saat itu. Karena kepentingan nasional yang telah mendorong Jepang untuk tetap mempertahankan

hubungan baiknya dengan Indonesia. Di antara empat kategori pokok identifikasi kepentingan nasional yang disimpulkan oleh Padelford dan Lincoln<sup>59</sup>, kiranya aspek 'economic welfare and advancement' merupakan aspek yang dominan dari kecenderungan Jepang untuk memelihara hubungan baiknya dengan Indonesia, oleh karena itu pembahasan bab ini hanya akan dipaparkan hasil penelitian yang membuktikan itu. Dalam bab ini, lebih lanjut, berturut – turut akan dipaparkan 'latar belakang fisik dan kepentingan vital Jepang', 'Politik Jepang terhadap Indonesia', dan 'Hubungan Ekonomi Indonesia – Jepang'.

#### IV.1. Latar Belakang Fisik dan Kepentingan Vital Jepang.

##### IV.1.1. Latar Belakang Fisik.

Kemampuan sistem politik suatu Negara untuk menciptakan lingkungan dan sekaligus mengendalikannya guna memenuhi kepentingan nasionalnya adalah terbatas. Kepentingan nasional suatu Negara ditentukan oleh banyak factor, diantaranya yang termasuk dominan adalah kondisi fisiknya yang meliputi keadaan geografi, ekonomi dan demografi. Berikut ini uraian lebih lanjut mengenai kondisi fisik Jepang yang merupakan penentu dominan terhadap kepentingan nasionalnya.

Bila dibandingkan dengan Uni Soviet, Amerika Serikat maupun China daratan, Jepang merupakan Negara yang kecil dan berpulau – pulau dengan luas wilayah 369.662 kilometer persegi; sedangkan luas wilayah Amerika Serikat 9.363.389 kilometer persegi, Uni Soviet 22.402.200 kilometer persegi dan China 9.561.000 kilometer persegi. Dari luas wilayah tersebut hanya enam belas persennya dapat ditanami. Dalam perang dunia ke dua Jepang menyerah kalah kepada Sekutu, sebagai akibat lebih lanjut Jepang kehilangan sebagian wilayahnya; antara lain Formosa, pulau – pulau Percadores, Korea, Wilayah Sewa Kwantung dan Pulau – pulau Perwalian Laut Selatan, Sakhalin Selatan dan Okinawa, (dikembalikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1972). Wilayah yang hilang tersebut seluas 311.514 kilometer persegi, empat puluh enam persen dari luas wilayah sebelum perang dan delapan puluh empat persen dari wilayahnya setelah perang.

---

<sup>59</sup> Tiga aspek yang lain dapat dilihat pada bab I hal. 10 – 11.

Wilayah Jepang setelah perang terdiri dari empat pulau – pulau pokok, Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu serta 3.300 pulau – pulau kecil dalam batas wilayahnya. Jepang merupakan Negara pulau – pulau dan gunung – gunung, keadaan ini sangat mempengaruhi karakter politik Negara tersebut. Pertama telah membentuk kesatuan politik Negara, ke dua memberikan perbatasan nasional yang sangat jelas yang dapat membentuk perasaan identitas kelompok yang kuat dalam menghadapi bangsa – bangsa asing. Kondisi geografi Jepang ini juga telah menyelamatkan Jepang dari usaha dominasi bangsa asing, sebelum tahun 1945 tak satupun bangsa asing berhasil mengadakan invasi ke kepulauan Jepang.

Walaupun modernisasi Jepang telah dimulai pada masa Meiji dengan diumumkannya Konstitusi baru tahun 1889 yang pada gilirannya menuju industrialisasi, namun kenyataan alami Jepang menunjukkan keadaan yang sangat miskin akan sumber – sumber alam maupun sumber – sumber bahan makanan yang merupakan bahan baku bagi pengembangan industry. Pada pertengahan ke dua tahun 1960an Jepang mengimpor rata – rata 92 persen dari Sembilan macam bahan baku: baukist, karet alam, batu fosfat, nikel, kapas dan wool, minyak mentah, bijih besi, tembaga, dan kokas batu bara; sedangkan dari empat macam sumber bahan bapangan: gula, kedelai, gandum, dan barley Jepang rata – rata mengimpor 73 persen.

Pertumbuhan penduduk Jepang cukup tinggi, sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 1965 menyimpulkan jumlah penduduk Jepang 98.281.955 orang, kira – kira tiga kali jumlah penduduk pada tahun 1910. Dalam hal jumlah penduduk ini, Jepang menduduki urutan ke tujuh setelah China, India, Uni Soviet, Amerika Serikat, Indonesia dan Pakistan. Distribusi penduduknya 265 orang perkilometer persegi dari wilayahnya sekarang, atau bila diambil luas tanah yang dapat ditanami, kira – kira 1.621 orang per kilometer persegi, suatu tingkat kepadatan yang cukup tinggi<sup>60</sup>.

Dari latar belakang fisik Jepang ini, kiranya dapat dibayangkan kepentingan vitalnya untuk mempertahankan eksistensinya, baik kewarganegaraannya maupun Negara sebagai anggota masyarakat internasional.

---

<sup>60</sup> Sumber diambil seperlunya dari Robert E. Ward, *op. cit.*, hal. 24 – 32.

#### IV.1.2. Kepentingan Vital Jepang.

Pada awal masa restorasi Meiji, Duta Besar berkuasa penuh Romomi Iwakura mengutus sejumlah pemimpin ditambah 50 orang anggota yang kemudian disebut 'Iwakura Shisetsu Dan' (Rombongan Utusan Iwakura) untuk mengadakan perjalanan keliling Eropah – Amerika. Perjalanan keliling itu berlangsung selama lebih kurang satu tahun sepuluh bulan (1871 – 1873). Bersama – sama rombongan, berangkat lebih kurang 60 pelajar yang akan belajar di Eropah – Amerika demi membangun Negara Jepang baru yang modern.

Tujuan perjalanan Rombongan Utusan Iwakura terdiri dari tiga macam. Pertama menyampaikan surat kepercayaan Negara, ke dua mengadakan perundingan mengenai hubungan ke dua Negara dan ke tiga mengadakan penelitian mengenai sistem lembaga pemerintahan modern, ilmu pengetahuan dan kesenian<sup>61</sup>.

Untuk membangun Jepang Modern, Rombongan Iwakura telah memilih Eropah – Amerika untuk dijadikan model dan selama mereka mengelilingi berbagai Negara di kedua benua tersebut, dengan penuh perhatian dan seksama, mereka mengamati berbagai hal di segala macam bidang. Rombongan tidak hanya memperhatikan Negara – Negara besar (Amerika, Inggris dan sebagainya) tetapi juga Negara – Negara kecil (Swiss, Belgia dan sebagainya). Dalam mengamati Negara – Negara besar, rombongan melihat adanya sivilisasi dimana Jepang jauh ketinggalan. Walaupun Jepang ingin mentransfer sivilisasi tersebut, namun menyadari keadaan Jepang yang belum memungkinkan hal itu, Rombongan tidak juga terus mengambil Negara kecil sebagai model. Akhirnya Rombongan menaruh rasa simpati terhadap jalan yang ditempuh Rusia, Negara kecil itu berhasil membangun kekaisaran Jerman sebagai Negara besar di tengah – tengah pergolakan politik internasional Eropah yang pada waktu itu menggunakan slogan 'yang lemah makan yang kuat'. Pembentukan kekaisaran Jerman pada tahun 1871 bertepatan waktunya dengan terwujudnya kesatuan Negara Jepang, pembubaran sistem wilayah han, pembentukan sistem wilayah ken. Melihat cara atau jalan yang ditempuh Rusia menuju

---

<sup>61</sup> Akitara Tanaka, "Jepang Modern dan Asia Tenggara" dalam Review Jepang, No. 7 Maret 1982, hal. 35.

pembentukan kekaisaran Jerman, para pemimpin restorasi serempak berpendapat, kiranya akan memungkinkan bila jalan tersebut ditempuh oleh Jepang.

Selama di Prusia, rombongan menemui Perdana Menteri Bismarck dan Jenderal Moltke. Dalam pertemuannya dengan Rombongan, Bismarck menjelaskan bahwa terbentuknya kekaisaran Jerman adalah berkat 'kekuatan', dan ketika Moltke menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah tidak lain dari kekuatan militer, maka mendengar hal itu Rombongan menaruh kesan yang dalam seakan mendapat ilham. "jalan dari Negara kecil menuju Negara besar" yang telah ditempuh Jerman inilah yang dipilih Jepang untuk membentuk Negara modern<sup>62</sup>.

Setelah merasa cukup mengelilingi Negara – Negara Eropa – Amerika, Rombongan bertolak pulang dengan singgah berlabuh di beberapa Negara. Berangkat dari Marseilles (Perancis), lewat Laut Tengah – Terusan Suez – Laut Merah – Lautan Hindia (Srilangka) terus ke Singapura, dari sana ke Saigon kemudian Hongkong Shanghai dan pulang.

Dalam perjalanan pulang, Rombongan melihat adanya kondisi yang sangat berbeda antara Negara – Negara Eropa Amerika dengan bangsa – bangsa Asia – Afrika yang terjajah, yang pada dasarnya Rombongan menyimpulkan bahwa bangsa – bangsa di tanah subur tidak kreatif, tidak bekerja keras dan tidak ada sivilisasi. Di samping itu, yang lebih penting bagi Jepang adalah bahwa sejak saat itu mulai melihat Asia Tenggara sebagai salah satu daerah sumber alam yang merupakan bahan baku bagi pengembangan industry dalam rangka modernisasinya, sehingga dapatlah digaris bawahi bahwa modernisasi Jepang meniru model Eropa – Amerika sedangkan sumber alam bagi modernisasinya dituntut dari Asia Tenggara. Dan untuk menyelamatkan modernisasi, Jepang mulai mengembangkan kekuatan militer.

Selanjutnya Jepang mulai mengembangkan sayapnya, kemenangan diplomatis maupun militer pada akhir tahun 1990an dan awal tahun 1900an, tidak hanya mengharumkan nama Jepang dalam politik internasional, tetapi juga memperluas wilayahnya, Sejak kemenangan Jepang dengan China tahun 1895 dan dengan Rusia pada tahun 1905, Jepang memperoleh tambahan Semenanjung Liaotung, Formosa, kepulauan Pescadores, wilayah sewaan Kwangtung dan Sakhalin Selatan. Dan akhirnya mengambil

---

<sup>62</sup> Akitara Tanaka, *Ibid.*, hal. 37.

Korea secara paksa. Kondisi ini menjadikan ekonomi Jepang maju pesat dengan industry sebagai pendukung utamanya.

Industry yang telah mulai maju, kondisi alam yang kurang atau miskin akan sumber – sumber alam dan kekuatan militer yang mulai dapat diandalkan, menjadikan Jepang agresif bersaing dengan kolonialis Barat, terutama di Asia Timur, untuk menguasai atau mengendalikan wilayah – wilayah tersebut guna memperoleh sumber – sumber alam dan pasar bagi barang – barang produksi industrinya. Sumber – sumber alam dan pasar, menjadi vital bagi eksistensi Jepang.

Salah satu kesan Rombongan Utusan Iwakura adalah melihat Asia Tenggara sebagai wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan akan sumber – sumber alam, kiranya tidak salah jika dikatakan bahwa ekspansi militer Jepang ke arah selatan yang pada hakekatnya menuju Asia Tenggara, didorong sangat kuat oleh keinginan untuk mendapatkan sumber – sumber alam di samping orientasi Jepang Raya yang memperoleh ilham dari kondisi Negara kecil Prusia menjadi Jerman Raya. Salah satu penyebab serangan militer Jepang terhadap Hindia Belanda (sekarang Indonesia) adalah gagalnya perundingan dagang Jepang – Belanda pada tahun 1940 – 1941 dimana Jepang menuntut jatah minyak lebih banyak dan sumber alam – sumber alam lain<sup>63</sup>.

Nampaknya, pemboman yang dijatuhkan di Jepang pada perang dunia ke dua hanya menghancurkan Jepang pada kulitnya saja sedangkan jiwa dan semangat Jepang sebelum tragedy perang dunia ke dua tetap utuh. Hal ini dibuktikan Jepang dengan kemajuannya yang pesat, terutama di bidang ekonomi, pada masa setelah perang.

Pada masa pendudukan (1945 – 1952), kemajuan ekonomi Jepang terangsang oleh pecahnya perang Korea di mana Amerika Serikat terlibat aktif. Amerika Serikat menggunakan Jepang sebagai pangkalan suplai logistic untuk kepentingan perang Korea. Setelah diberi kemerdekaan kembali, kesadaran Jepang akan kebutuhan bahan baku industrinya mengingatkan kepada masa sebelum perang yang hampir – hampir berhasil menguasai seluruh Negara – Negara kawasan Asia Tenggara yang dipandang sebagai pensuplai bahan baku industrinya. Jepang berusaha sekuat – kuatnya untuk mencapai kembali Asia Tenggara. Jika pada masa sebelum tahun 1945 Jepang mencapai Asia

---

<sup>63</sup> Masashi Nishihara, *op. cit.*, hal. 4.

tenggara dengan diplomasi dan militer, pada masa setelah tahun 1945 sampai sekarang Jepang mencapai Asia Tenggara dengan ‘diplomasi ekonomi’. Jika pada masa sebelum 1945 Jepang cenderung menguasai Asia Tenggara untuk memenuhi bahan baku industrinya, pada masa sesudah 1945 Jepang cenderung bekerjasama dan merangkul seerat – eratnya Negara – Negara Asia Tenggara untuk memperoleh bahan baku industrinya.

Jika kita melihat kembali kondisi fisik Jepang dan usaha Jepang untuk memperoleh sumber – sumber alam, menjadi sangat jelas bahwa sebagian terbesar sumber – sumber alam bagi industrinya harus didatangkan dari luar negeri dengan cara apapun yang mungkin. Bagaimanapun, ekonomi Jepang sangat tergantung pada perdagangan internasional, di luar pengendalian wilayah politiknya. Eksistensi Jepang pada masa sesudah perang tergantung dari factor – factor yang berhubungan integral dan akan lumpuh bila salah satunya terlepas, factor – factor itu setidaknya – tidaknya terdiri dari: tenaga ahli, pabrik, sumber alam dan pasar. Tenaga ahli dan pabrik dimiliki Jepang tetapi sumber alam dan pasar tidak dimiliki dan harus diperoleh dari luar negeri, sehingga vital bagi Jepang terciptanya kondisi lingkungan internasional yang damai, stabil dan makmur. Seperti dikutip oleh Akio Watanabe dalam penelitiannya pada ‘Japanese Public Opinion and Foreign Affairs: 1964 – 1973’, sebagai berikut:

“Today, however a similar vulnerability has caused Japanese leaders to urge the maintenance of ‘a peaceful, prosperous international Society’ and the practice of ‘international cooperation’ as of ‘vital importance’ for Japan”<sup>64</sup>.

Dari uraian sederhana di atas dapatlah disimpulkan bahwa kepentingan vital Jepang, terutama pada periode setelah perang adalah terciptanya lingkungan internasional yang damai, aman, stabil dan makmur sebagai lingkungan perdagangan bebas sekaligus memperoleh sumber – sumber alam, dengan ‘diplomasi ekonomi’ dan ‘kerjasama ekonominya’.

#### IV.2. Politik Jepang terhadap Indonesia.

Kehati – hatian Jepang dalam diplomasi sesudah perang menuju Asia dengan mengesampingkan masalah – masalah politik dan menekankan pada kerjasama ekonomi

---

<sup>64</sup> Akio Watanabe, “Japanese Public Opinion and Foreign Affairs: 1964 – 1973”, dalam Robert A. Scalapino (ed), op. cit., hal. 116.

dan kebudayaan nampaknya tidak terlepas dari usaha Jepang untuk mencapai tujuan politiknya di wilayah tersebut, yaitu mencapai kemajuan ekonomi dan kestabilan politik Negara – Negara non-Komunis Asia. Kemajuan ekonomi dan kestabilan politik Negara – Negara non-Komunis Asia, khususnya Asia Tenggara, berarti memudahkan pemasaran barang – barang pabrikan hasil industrinya sekaligus memperoleh sumber – sumber alam sebagai bahan baku industrinya, di samping dengan sendirinya menahan kemajuan Komunisme dikawasan itu sesuai dengan politik ‘menahan’ Amerika Serikat.

Hubungan yang lebih luas antara Indonesia – Jepang baru dimulai pada tahun 1958, setelah ditandatangani perjanjian ‘persetujuan pembayaran pampasan perang’ dan ‘perjanjian perdamaian bilateral’ pada tanggal 15 April 1958. Namun hubungan ekonominya telah terjalin sejak akhir tahun 1940an pada masa Jepang diduduki oleh tentara Sekutu. Secara politik, Jepang memperoleh jalan untuk menjalin hubungan dengan Indonesia setelah ditandatangani perjanjian San Fransisco September 1951.

Indonesia, salah satu Negara non-Komunis terbesar di Asia Tenggara<sup>65</sup>, walaupun politiknya lebih dekat dengan blok Komunis pada masa sebelum kudeta yang gagal pada bulan September 1965, jelas tidak mungkin terlepas dari perhatian Jepang. Bahkan perhatian Jepang kepada Indonesia sejak masa jauh sebelum perang dunia ke dua, seperti dinyatakan oleh Rombongan Utusan Iwakura pada masa awal Restorasi Meiji dan juga dinyatakan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia merupakan sumber bahan baku industry yang potensial. Dan suatu kenyataan bahwa Jepang telah mencapai Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pada awal tahun 1940an dengan diplomasi dan militer yang akhirnya pada akhir pertengahan tahun 1940an menguasainya secara paksa.

Dorongan kuat bagi Jepang dalam gerakannya ke arah selatan adalah kebutuhannya akan bahan baku industry dan para pemimpin Jepang merasa bahwa jalan yang paling meyakinkan dan paling cepat adalah dengan ekspansi politik dan kekuatan militer, seperti dinyatakan oleh Jhon K. Emmerson sebagai berikut:\

---

<sup>65</sup> Asia Tenggara adalah kawasan yang meliputi Negara – Negara: Burma, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Brunei serta tiga Negara Indochina (Vietnam, Laos, Kamboja).



“A powerful impetus to those who advocated the “Southward advance” was the need for raw materials essential to an industrial economy, In the minds of Japan’s leaders, the surest and shortest way to this and was the expansion of political and military power”<sup>66</sup>.

Namun pandangan ini berakibat fatal bagi Jepang, setelah kemenangan kilatnya menguasai sebagian besar Asia Timur dan Asia Tenggara terhadap kekuatan Sekutu yang sering disebut kekuatan ABCD: Amerika Serikat, Inggris, China Nasionalis dan Belanda pada pertengahan pertama tahun 1940an, akhirnya menyerah tak bersyarat kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945 yang berarti hancurnya cita – cita Jepang raya. Sejak itu Jepang diduduki oleh Amerika Serikat sampai April 1952.

Selama masa pendudukan, Jepang mengalami perubahan – perubahan mendasar sebagai akibat dari eksistensinya pada masa perang. Perubahan yang paling menyolok dan paling mendasar adalah dilumpuhkannya eksistensi militernya yang diformalkan dalam Konstitusi baru Jepang, walaupun dalam tahun 1961 Pengadilan Tinggi Jepang memutuskan bahwa Konstitusi tidak menghalangi dipergunakannya hak utama Jepang untuk mempertahankan dirinya terhadap agresi<sup>67</sup> yang selanjutnya merupakan legitimasi terbentuknya embrio kekuatan militer.

Selama masa pendudukan itu juga, hubungan Jepang dengan Negara – Negara tetangga hampir terputus sama sekali dan baru setelah bulan April 1952 Jepang Merdeka kembali sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Sebelum kemerdekaan diberikan, pada bulan September tahun 1951 diselenggarakan Konferensi San Fransisco yang menentukan syarat bagi kemerdekaan Jepang diantaranya adalah dibentuknya fakta pertahanan bilateral Amerika Serikat – Jepang dan kewajiban Jepang membayar pampasan perang kepada Negara – Negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Fakta pertahanan itu lebih merupakan perlindungan Amerika terhadap Jepang, sehingga walaupun eksistensi militer Jepang telah dilumpuhkan namun Jepang tetap merasa aman. Sedangkan kewajiban membayar pampasan perang memberikan jalan kembali kepada Jepang untuk menjalin hubungan dengan Negara –

---

<sup>66</sup> Jhon K. Emmerson, *op. cit.*, hal. 284.

<sup>67</sup> Deplu, *Asia Pasifik Selayang Pandang tahun 1969*, Direktorat Asia Pasifik Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1969, hal. 99.

Negara Asia Tenggara yang dipandang sangat potensial bagi Jepang, terutama sumber – sumber alamnya.

Setelah diberi kemerdekaan, Jepang terus menormalisasi, Jepang terus menormalisir hubungannya dengan Negara – Negara tetangga, terutama Negara – Negara Asia. Di antara Negara – Negara Asia, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi Jepang yaitu kekayaan sumber – sumber alamnya dan lokasi geopolitik yang penting, daya tarik ini telah menjadi perhatian Jepang sejak sebelum perang pasifik. Hal tersebut nampak dalam pernyataan berikut:

“Among the Asian countries Indonesia has particularly attracted Japan ny its rich natural resources and geopolitically important location since before the Pasific war. It should be remembered that Japan’s southward advance in the late 1930s was motivated primarily by Indonesia’s then the Dutch East Indies’ -oil”<sup>68</sup>.

Hubungan Indonesia – Jepang bermula dari perundingan pampasan perang sejak September 1951 dengan bertemunya delegasi Indonesia dengan delegasi Jepang yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru yang menjanjikan secara langsung kesediaan Jepang untuk membayar pampasan perang kepada Indonesia. Pada tanggal 6 September 1951 pada Konferensi, Menteri Luar Negeri Subandrio menyampaikan pidato dalam mana dia menekankan pentingnya pampasan perang Jepang sebagai Prasyarat perjanjian perdamaian dengan Jepang. Perjanjian berbelit – belit dan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya dapat diselesaikan pada tanggal 15 April 1958. Dan hari itu juga hubungan diplomatic Indonesia – Jepang dibuka.

Hubungan Indonesia – Jepang dibuka dua bulan setelah proklamasi dari kelompok anti – Komunis yang menyatakan melawan pemerintah pusat Jakarta dan menanamkan dirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pada tanggal 15 Februari 1958. Walaupun pemberontakan dapat diselesaikan hanya dalam beberapa bulan, nampaknya menjadikan pemerintah Presiden Sukarno lebih dekat dengan Negara – Negara Komunis karena ternyata Amerika Serikat terlibat mendukung para pemberontak. Secara ideology dan politik, mestinya Jepang memperhitungkan kembali dan bila perlu menunda

---

<sup>68</sup> Masashi Nishihara, *op. cit.*, hal. 4.

membuka hubungan diplomatic dengan Indonesia karena ketegangan Indonesia dengan Amerika Serikat dan kecenderungan Indonesia kepada Negara – Negara Komunis.

Nampaknya, kelimpahan para pemberontak anti-Komunis dalam waktu singkat merupakan salah satu yang mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang untuk mendukung pemerintah Presiden Sukarno, namun kiranya menjadi jelas apa sebenarnya latar belakang yang mendorong Jepang untuk membuka hubungan diplomatic dengan Indonesia. Politik Jepang dalam hubungan internasional setelah perang sudah jelas yaitu bekerjasama seerat – eratnya dengan Negara – Negara tetangga dengan diplomasi ekonomi dan kerjasama ekonomi dengan sedapat mungkin menghindari campur tangan masalah – masalah politik dan ideology. Bahkan dalam diplomasinya dalam hubungannya dengan China Komunis, walaupun Jepang tidak akan mengakui China Komunis, Jepang berusaha memperkuat kekuatan dalam negerinya untuk berusaha mengadakan kontak secara bebas dengan China Komunis, dengan diplomasinya yang tegas bahwa Jepang adalah salah satu Negara Asia yang menyadari dan mengakui bahwa China lebih penting dari pada bangsa Barat manapun. Seperti pernyataan Ikeda yang dikutip oleh Lawrence Olson dalam bukunya ‘Japan in Postwar Asia’ sebagai berikut:

“Ikeda reiterated that Tokyo would not recognize the mainland regime, but he tried to increase his leverage at home by insisting that Japan was a Asian coutry, knew China better than any western nation possibly could, and was ready for more independent contact. In the Diet he answered Socialist interpellations by declaring, “it is obvious that Japan is not cooperating with America’s policy to contain Communist China, judging from the fact that Japanese trade with the mainland is increasing by leaps and bounds”<sup>69</sup>.

Memang, tujuan utama Jepang periode setelah tahun 1952 adalah stabilitas pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bila pada masa sebelum perang Jepang keluar dari sistem dunia dan berusaha menciptakan sistem dunianya yang baru di bawah hegemoni politiknya, dengan konsep ‘Asia Timur Raya’, maka kehancurannya pada perang dunia II diikuti suatu usaha dengan metode yang sangat cermat dan konsentrasi penuh, membangun kemampuan produktif yang membimbing kepada kekuatan industrinya. Lebih dari itu, Jepang memasukkan

---

<sup>69</sup> Lawrence Olson, *Op. cit.*, hal. 93.

ekonominya ke dalam sistem dunia, dimana Jepang telah gagal melakukan sebelumnya, dan seperti telah dikatakan oleh Peter Drucker, selama dua puluh tahun berlangsung telah secara sistematis merencanakan kecenderungan – kecenderungan ekonomi dunia ke dalam politik ekonominya, baik dalam negeri maupun internasional<sup>70</sup>.

Walaupun pada tahun 1959 Jepang hanya menjual seperempat dari barang – barang produksi pabriknya ke luar negeri, lebih kecil dibanding dengan eksportnya pada masa sebelum perang, pada tahun 1938 ekspor barang – barang produksi pabrik Jepang mencapai 40 persen<sup>71</sup>. Dari gambaran di atas nampaknya Jepang tidak terlalu tergantung dari perdagangan internasional. Namun melihat kondisi alam Jepang, perdagangan internasional tetap merupakan garis kehidupan vital yang berarti kebutuhan akan sumber – sumber alam dan pasar tetap merupakan kebutuhan akan sumber – sumber alam dan pasar tetap merupakan kebutuhan yang mendasar bagi Jepang selama – lamanya. Oleh karena itulah, walaupun dalam posisi politik dan ideology yang berbeda, Jepang tetap berusaha menjalin hubungan dengan Indonesia, Jepang tetap berusaha menjalin hubungan dengan Indonesia. Kepentingan akan bahan baku dari Indonesia yang sudah mulai diusahakan pada masa – masa sebelum perang, diteruskan pada masa – masas sesudah perang, seperti dikuti oleh Masashi Nishihara sebagai berikut:

“Japan’s interest in Indonesia’s natural resurces and geopolitical location continued into the postwar period. As early as 1951 the Japanese government began discussing measures to develop Indonesia industries and to import Indonesian resources”<sup>72</sup>.

Untuk mendukung tercapainya kepentingan Jepang di Indonesia, diperlukan kondisi domestic Indonesia yang memungkinkan, diantaranya yang penting adalah adanya kesatuan dan kestabilan politik nasional. Dengan kesatuan dan kestabilan politik nasional yang mantab, Jepang dapat lebih leluasa melancarkan diplomasi ekonominya untuk memperoleh konsesi – konsesi, terutama konsesi untuk memperoleh sumber – sumber alam sebagai bahan baku industrinya.

---

<sup>70</sup> Jhon K. Emmerson, *op. cit.*, hal. 285

<sup>71</sup> Jhon K. Emmerson, *Ibid.*, hal. 285.

<sup>72</sup> Masashi Nishihara, *op. cit.*, hal. 5.

Sikap Jepang terhadap pemberontakan di Indonesia pada awal tahun 1958 tetap menampakkan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Sukarno, walaupun para pemberontak menyatakan sikap 'anti-Komunis' sebagai salah satu alasannya yang sesuai dengan kepentingan politik Jepang. Sikap Jepang ini nampaknya didorong oleh keyakinan pemerintah Jepang bahwa hanya Sukarnolah satu – satunya pemimpin kharismatis yang mampu mempersatukan Indonesia yang penuh dengan heterogenitas. Di Negara sedang berkembang seperti di Indonesia, pemimpin kharismatik mempunyai peranan yang sangat dominan dalam masyarakat yang mampu berdiri tegak di atas perbedaan nilai – nilai budaya masyarakatnya. Sebagai tokoh yang dipuja, pemimpin kharismatik merupakan symbol persatuan nasional atas semua bagian – bagian penduduk secara keseluruhan. Selain mengidentifisir diri sebagai seorang pribadi, seorang pemimpin kharismatik juga mengidentifisir dirinya sebagai Negara dan bangsa. Pengorbanan dan perjuangannya merupakan contoh teladan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam sejarah perjuangan bangsa, dia adalah tokoh sentral yang tak ada duanya, yang mempunyai kemampuan tinggi menyelaraskan hubungan – hubungan kepentingan yang saling bertentangan<sup>73</sup>. Sikap dukungan Jepang terhadap pemerintahan Presiden Sukarno, sejak dibukanya hubungan diplomatic kedua Negara pada tahun 1958, diyakini dan dipertahankan Jepang sampai setidaknya – tidaknya pertengahan Januari 1966, walaupun kecenderungan perjuangan nasional dan internasional Presiden Sukarno lebih dekat dengan Negara – Negara blok Komunis. Dituliskan oleh Masashi Nishihara sebagai berikut :

“The Japanese government had support the Sukarno regime since the inception of diplomatic relation with Indonesia in 1958 and had committed a large amount of economic aid through the reparations funds, private capital investment, and differed payment import credits. Japan was convinced that Sukarno was the only charismatic leader who could maintain political unity within Indonesia's large heterogeneous society. In addition, it would be very difficult for Japan to assist a group opposing the government with which it had maintained close relationship. This neutral (though leaning toward Sukarno) position was maintained at least superficially until mid-January 1966”<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Lester G. Seligman, “Pengaruh Tokoh – Tokoh politik dan pembangunan Politik”, dalam Drs. Sahat Simamora, Beberapa Aspek Pembangunan Politik Sebuah Bunga Rampai, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 118.

<sup>74</sup> Masashi Nishihara, op. cit., hal. 198.

Keyakinan akan kemampuan Presiden Sukarno memelihara kesatuan politik Indonesia merupakan satu factor dukungan Jepang terhadap pemerintah Indonesia, karena kondisi itu memungkinkan bagi Jepang untuk memperluas konsesi – konsesi eksploitasi sumber – sumber alam yang diperlukan bagi bahan baku industrinya.

Persetujuan perjanjian pampasan perang, perjanjian perdamaian yang kemudian membuahkan hubungan diplomatic Indonesia dengan Jepang, merupakan legitimasi bagi Jepang untuk memperoleh konsesi – konsesi formal dalam usaha mengeksploitasi sumber – sumber alam Indonesia bagi kepentingan industrinya yang dipelihara dan dijaga selamanya.

Mulai pada tahun 1958, pemerintah Jakarta berusaha melakukan peran yang dipilihnya sendiri sebagai pemimpin revolusioner dalam masalah – masalah regional dan juga aktif berpartisipasi dalam panggung internasional. Kedudukan Indonesia dalam suasana perang dingin condong ke arah apa yang disebut ‘New Emerging Forces of Asian Africa, and Latin America’, yang dinyatakan berlawanan dengan sisa – sisa ‘Old Established Forces of Capitalist Imperialism’ yang masih hidup. Selama kunjungannya ke Uni Soviet pada awal tahun 1959, Presiden Sukarno didesak untuk mengambil orientasi baru. Moscow melihat Indonesia yang sedang bangkit dan perang internasionalnya, merupakan satu kesempatan menantang kesombongan Barat di Asia Tenggara dan sekaligus merupakan sekutu dalam menghadapi kemungkinan ancaman dominasi China pada suatu saat setelah Barat dapat diusir.

Politik luar negeri Indonesia yang baru ini menekankan suatu pernyataan terbuka dalam pertikaian lamanya dengan Belanda tentang penyerahan Irian Barat (sekarang Irian Barat) yang diminta. Dalam perjanjian dengan Belanda pada tahun 1949, Kerajaan Belanda telah mengakui kedaulatan Jakarta atas wilayah Indonesia tetapi menekankan bahwa Irian Barat merupakan masalah yang terpisah. Perundingan – perundingan berikutnya dalam masalah Irian Barat tidak menghasilkan hasil – hasil yang positif. Belanda menyangkutpautkan kepentingan – kepentingannya dan perasaan kebanggaannya sebagai kolonialis. Ditambah dengan rasa tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan penduduk primitif Irian. Belanda menyatakan bahwa penduduk Irian, secara etnik dan kultur, berbeda

dengan bangsa Indonesia pada umumnya dan sebagian terbesar dari wilayah itu tidak pernah menyatu dalam satu kekuasaan politik sebelum kedatangan Belanda.

Pertikaian Indonesia – Belanda menjadi masalah yang tak teratasi. Belanda menyatakan bahwa posisi Irian Barat tidak memiliki hubungan dengan kemerdekaan Indonesia dan bahwa Jakarta tidak mampu dan tidak memiliki modal serta keahlian untuk pembangunan wilayah ini. Kedudukan ini didukung oleh Australia, yang disertai penguasaan atas wilayah pulau itu separo bagian timur. Indonesia, dalam pihak lain menyatakan bahwa pendudukan Belanda yang diteruskan adalah ilegal dan tak dapat ditolerir dan bahwa integritas bangsa Indonesia yang sedang bangkit tergantung pada penghancuran sisa kekuasaan akhir colonial Belanda ini.

Kecenderungan Indonesia kepada blok Komunis dalam persekutuan internasionalnya telah dimulai sejak tahun 1957. Amerika Serikat dan Inggris kemudian dituduh member dukungan kepada kolonialis sejak tahun 1949. Penyebaran pangkalan – pangkalan militer darat, udara dan laut Amerika Serikat di wilayah Pasifik barat dapat mengancam Jakarta, dan juga kehadiran Inggris di Singapura, Malaya dan Kalimantan Utara mendatangkan ancaman yang sama. Namun kehadiran Amerika dan Inggris tidak ditolak sama sekali.

Politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan arah yang cukup mendasar pada tahun 1960. Presiden Sukarno bertekad merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Penolakan Amerika Serikat untuk menjual persenjataan kepada Indonesia mendorong Presiden Sukarno menuju ke arah hubungan yang lebih dekat dengan Uni Soviet. Ketika Belanda mengirimkan kapal induknya ke perairan Irian Barat pada pertengahan tahun 1960. Presiden Sukarno memutuskan hubungan diplomatic dengan Belanda, dan pasukan dipersiapkan untuk perang. Dalam keadaan seperti ini, kunjungan Jenderal Nasution disambut dengan hangat di Moscow dan menjanjikan bantuan militer senilai setengah milyar dollar.

Jepang, sebagai Negara yang termasuk kelompok Barat, dipandang Belanda sebagai tempat yang strategis yang memberikan fasilitas – fasilitas tertentu dalam rangka mempertahankan Irian Barat, sehingga Belanda berkali – kali meminta kepada Jepang untuk memberikan fasilitas – fasilitas yang diperlukan dalam sengketa Irian Barat dengan

Indonesia yang baru berakhir pada tahun 1962 dengan kemenangan di pihak Indonesia. Misalnya, Belanda meminta izin Jepang untuk persinggahan Kapal Perang Karel Doorman dalam rangka pertahanan Irian Barat pada tahun 1960, dan pada tahun 1962 Belanda meminta izin pemerintah Jepang untuk persinggahan kapal – kapal terbangnya yang membawa personil – personil militernya dalam rangka pertahanan Irian Barat.

Dalam kedua kasus di atas, walaupun pada awalnya Jepang Nampak mengalami kesulitan mengambil keputusan, namun akhirnya dengan tegas Jepang menolak memberikan fasilitas – fasilitas. Kiranya dapat diduga, latar belakang apakah yang mendorong Jepang untuk mengambil keputusan itu. Dalam kasus Kapal Karel Doorman, Jepang mengambil keputusan tegas setelah diancam pemutusan hubungan ekonomi Indonesia, dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Kosaka yang menyatakan bahwa ‘he did not want to trade an Asian friend for an aircraft carrier’<sup>75</sup>. Sedangkan dalam kasus KLM, Jepang telah menolak memberikan fasilitas karena khawatir menimbulkan ketegangan dan mengganggu persahabatan dengan Indonesia.

Bagaimanapun, kondisi alam Jepang menjadikan Jepang sangat memerlukan sumber – sumber alam dari Negara – Negara luar. Kelestarian hubungan baik dengan Indonesia sangat penting bagi Jepang karena Indonesia dipandang sebagai pasar potensial yang terbesar dan sumber bahan mentah yang paling kaya di Asia Tenggara, walaupun terdapat hambatan – hambatan yang cukup menyulitkan. Lebih lanjut dinyatakan oleh Lawrence Olson sebagai berikut:

“The country (Indonesia,pen) was regarded as the largest potential market and richest source of raw materials in Southeast Asia; but like Philippines, Indonesia severely restricted Japanese residence and granted visas capriciously. The memory of the wartime occupation was vivid, attitudes toward the Japanese ambivalent, the political situation confused and turbulent”<sup>76</sup>.

Kondisi Indonesia yang dipandang Jepang sangat menguntungkan ini kiranya tidak akan ditukarkan dengan apapun yang dapat menggoyahkan hubungan akrabnya.

Sengketa Indonesia – Belanda tentang Irian Barat berakhir setelah dicapai persetujuan pada bulan Agustus 1962 yang diprakarsai oleh Sekjen PBB U Thant dan Ells

---

<sup>75</sup> Masashi Nishihara, *op. cit.*, hal. 160

<sup>76</sup> Lawrence Olson, *op. cit.*, hal. 57.



worth Bungker dari Amerika Serikat. Pengaturan Irian Barat diserahkan kepada PBB sebelum dikembalikan ke Indonesia, rakyat Papua akan diberi kesempatan untuk memutuskan, dengan kerjasama dengan PBB, apakah ikut Indonesia atau tidak. Akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan oleh PBB kepada pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1961, Tengku Abdul Rahman merencanakan pembentukan federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah dan Kalimantan Utara. Rencana federasi ini ditentang oleh Indonesia karena pembentukan federasi tersebut didalangi oleh Inggris sebagai neo-kolonialis yang sangat dibenci oleh Presiden Sukarno. Sikap tidak setuju Indonesia terhadap pembentukan federasi Malaysia tersebut tidak ditanggapi oleh Tengku Abdul Rahman dengan tanggapan yang bersifat damai, sehingga pada awal tahun 1963 Indonesia melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Subandrio menyatakan dengan tegas politik konfrontasi dengan Malaysia. Masalah Indonesia – Malaysia merupakan masalah yang cukup hangat karena melibatkan Negara – Negara yang saling bertentangan dalam perang dingin, Malaysia didukung oleh Inggris dan kawan – kawan sedangkan Indonesia didukung oleh China dan kawan – kawan. Sengketa ini mulai memuncak pada bulan September 1963 setelah federasi diresmikan, kondisi sengketa menuju kepada suasana perang terbuka antara Malaysia dan Indonesia.

Jepang, Negara yang berkepentingan terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara untuk kepentingan ekonominya, kiranya tidak akan tinggal diam melihat sengketa Indonesia – Malaysia berkembang menjadi perang terbuka yang akan merugikan kepentingannya. Peran Jepang dalam perpecahan Indonesia dengan Malaysia, sebagian tumbuh dari keterlibatannya dengan Indonesia melalui pembayaran pampasan perang. Lima tahun sebelumnya, tahun 1958, Jepang menandatangani perjanjian perdamaian dan pembayaran pampasan perang dengan Indonesia. Setelah perundingan berlarut – larut selama enam tahun, Jepang akhirnya menyetujui pembayaran \$ 20 juta setahun selama dua belas tahun. Jepang juga membayar pampasan semacam ini kepada Birma dan Filipina, dan member hadiah dana kepada Laos dan Kamboja. Ketegangan yang bertambah besar antara Malaysia, Filipina dan Indonesia akan mengurangi manfaat pembayaran – pembayaran pampasan perang Jepang kepada Indonesia – Filipina. Jepang berharap bahwa pembayaran – pembayaran pampasan perang itu kelak akan melahirkan pasar ekspor yang

menguntungkan Jepang di Negeri – negeri ini. Jepang mengikuti dengan seksama proses pembentukan federasi Malaysia dan waspada terhadap pengaruh – pengaruh yang mungkin merusak hubungan ekonominya dengan kawasan tersebut.

Pembayaran sebanyak \$ 20 juta setiap tahun dalam bentuk barang dan jasa oleh Jepang itu ternyata merupakan bantuan ekonomi yang cukup berarti bagi Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Jepang telah membantu Indonesia memperbaiki kedudukan perdagangan luar negerinya. Penanaman modal Jepang yang besar dan yang pertama adalah di bidang minyak di Sumatera Utara. Kontak senjata antara Jakarta dan Kuala Lumpur akan terjadi di Selat Malaka atau di perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan. Bila kontak senjata terjadi di Selat Malaka, maka proyek – proyek pembangunan bidang minyak Jepang di Sumatera Utara akan mengalami kehancuran yang pertama.

Kemungkinan kontak senjata juga mengancam keamanan Malaka. Jepang sangat tergantung pada minyak Timur Tengah, Jepang menderita kemunduran di sector komoditi baru bara dan nyaris tidak menghasilkan minyak dan gas alam sama sekali<sup>77</sup>, sehingga setiap gangguan terhadap pengangkutan minyak melalui Selat Malaka akan merugikan industry – industry pentingnya.

Pada awal tahun 1960an, ekonomi Jepang sudah mulai mantab sehingga telah memungkinkan Jepang kembali kepada turut campurnya menangani masalah – masalah internasional, lebih – lebih yang menyangkut kepentingan vitalnya. Di samping itu mulai terdapat desakan – desakan dari luar Jepang melakukan peran lebih aktif dalam masalah – masalah internasional. Namun, Departemen Luar Negeri dan partai yang memerintah memperingatkan untuk berhati – hati dalam hal ini, karena dimungkinkan terjadi reaksi yang tidak menguntungkan dari Negara – Negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Ikeda Hayato, Perdana Menteri dan Ketua Partai yang memerintah dari tahun 1960 sampai tahun 1964, dan Kawashima Shojiro, Wakil Partai yang memerintah dari tahun 1964 sampai tahun 1970, terlibat aktif dalam urusan – urusan Indonesia. Keduanya serta Departement Luar Negeri tidak menyetujui konfrontasi dan menyelaraskan usaha – usaha

---

<sup>77</sup> Qystein Noreng, Minyak dalam Politik Upaya Mencapai Konsesus Internasional, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 59.

mereka untuk menengahi<sup>78</sup>. Salah satu factor yang mendorong Ikeda menengahi sengketa itu menjadi sengketa antara Timur dan Barat dalam arti yang lebih luas, dan juga bahwa Asia yang stabil akan menjamin ekspor barang – barang Jepang menjadi lancer ke kawasan itu<sup>79</sup>. Walaupun semua usaha Ikeda tidak berhasil, namun pemerintah Sato, yang menggantikan Ikeda pada tahun 1964, Departemen Luar Negeri dan pimpinan partai yang memerintah, terutama Kawashima, berusaha menjaga agar hubungan Jepang – Indonesia tetap utuh. Pada bulan Februari 1965, Jepang merencanakan mendirikan suatu usaha bersama dengan Indonesia, yaitu mendirikan ‘the Far East Oil Tradeing Company’ yang akan mengimpor minyak mentah langsung dari Indonesia tanpa melalui perusahaan – perusahaan minyak Barat. Karena Indonesia baru saja mengumumkan penyitaan harta kekayaan perusahaan minyak Amerika dan Inggris karena ingin menjual minyaknya sendiri, Jepang tidak saja berharap akan menarik manfaat dari usaha bersama ini tetapi juga untuk menghalangi jangan sampai minyak Indonesia mengalir ke Tiongkok<sup>80</sup>.

Kondisi alam dan kemajuan industry Jepang, dalam berhubungan dengan Indonesia, bagaimanapun mendorongnya untuk berusaha memperoleh sumber – sumber alam dari Indonesia, terutama minyak, kayu dan nikel. Jepang menyadari bahwa Indonesia belum mampu mengusahakan penambangan sendiri sehingga Jepang memerlukan campur tangan untuk memenuhi kepentingannya, baik financial maupun tenaga ahli.

Dinyatakan oleh Lawrence Olson sebagai berikut :

“Howerer, Japan wanted oil, logs, nickel, and other resources, which were beyond the ability of the Indonesians alone to exploit. Normal Indonesian export to Japan were tiny and the trade was lopsided: in 1960 Japan import \$ 45 million worth of goods from Indonesia and expord \$ 104 million worh. To help get out the resources with what appeared to be minimal financial risk and at the sametime to satisfy the economic nationalism of the Indonesians, an arrangement for “production sharing” was devised between the two government ini 1960 – 1961, affecting the three commodities mentioned. The Japanese government agreed to lend Permina, the Indonesian government’s oil corporation, a total of more than \$ 50 million over 10 years. In June 1960 the Japanese government and concostium of Japanese companies set up the North Sumatera Oil Development Company (NOSODECO) to exploit old Shell Installations destroyed or damage repeatedly

---

<sup>78</sup> Ichimura dan Koentjaraningrat, *op. cit.*, hal. 62.

<sup>79</sup> Ichimura dan Koentjaraningrat, *Ibid.*, hal. 66.

<sup>80</sup> S. Ichimura dan Koentjaraningrat, *Ibid.*, hal. 62.

during and after the war, NOSODECO supplied equipment and technical assistance; Pertamina agreed to discharge the loan with shipments of 40 percent of production after reserving a basic amount annually with a total scheduled repayment of 5.8 million kiloliters. By the end August 1968 the Japanese had furnished about 70 percent of their pledges and had received about half of the total repayment in crude oil. Agreements for exploitation of nickel and timber followed a similar pattern; the nickel agreement envisaged the possibility of eventually building a smelter in Celebes to process the ore”<sup>81</sup>.

Keterlibatan Jepang dalam sengketa Indonesia – Malaysia terhenti ketika terjadi kudeta pada tanggal 30 September 1965 oleh Untung yang didukung oleh kekuatan – kekuatan PKI. Sejak terjadi kudeta yang gagal itu, posisi Presiden Sukarno semakin goyah, kharismanya semakin berkurang, sehingga keseimbangan antara Tentara dan PKI tidak dapat lagi dikendalikan. Namun, walaupun Tentara (Angkatan Darat) semakin memiliki posisi yang mantab, sampai Maret 1966 belum nampak adanya pemusatan kekuatan yang segera mengakhiri kemelut politik yang terjadi. Kekuatan pendukung Presiden Sukarno masih cukup eksis. Sementara itu, Jepang tidak mempunyai pilihan lain kecuali tetap mendukung Presiden Sukarno, walaupun bersikap sangat berhati – hati dan menunggu.

Bagi Jepang, perubahan politik maupun struktur kekuasaan di Indonesia tidak banyak mempengaruhi politiknya, walaupun akan lebih baik bagi Jepang bila Indonesia dalam pihak atau lebih dekat dengan Negara – Negara Barat. Kiranya politik Jepang terhadap Indonesia tidak akan berubah apakah Indonesia akan tetap di bawah Presiden Sukarno atau berpindah kepada yang lain (Mayor Jenderal Suharto). Mungkin tetap seperti masa – masa yang lalu, yang nampak bagi Jepang, Indonesia adalah kaya sumber alam dan merupakan ekspor yang potensial. Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Sukarno menandatangani sebuah “Surat Perintah” kepada Mayor Jenderal Suharto yang, yang kemudian menjadi legitimasi posisinya yang semakin kuat yang akhirnya menjadi Presiden menggantikan Presiden Sukarno. Sejak saat itu, dikatakan secara de facto kekuasaan Presiden Sukarno telah hilang.

Kemungkinan sikap Jepang terhadap Indonesia yang tidak berubah dalam arti tetap memelihara hubungan baik dengan Indonesia, lebih tegas dinyatakan oleh Kawashima Shojiro pada tanggal 12 Maret 1966 sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Lawrence Olson, *op. cit.*, hal. 59.

“although the leadership of Indonesia has changed, Japan’s basic policy toward Indonesia remains unaltered. It is to tie Japanese economic power and technology to Indonesia’s rich natural resources in order to promote the prosperity of both countries. Indonesia will need more Japanese assistance than before to reconstruct its economy. The voice calling for the dismissal of Subandrio signifies that the military regime in tends to cut off relations with China, which means that the military are not thinking of soliciting aid from China. This means increased reliance upon Japan. It would be in our national interest to respond to such a need”<sup>82</sup>.

Dorongan bagi Jepang yang utama dalam berhubungan dengan Indonesia sejak dibukannya hubungan diplomatic tahun 1958 tidak lain adalah kekayaan sumber-sumber alam yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 1956, sebelum persetujuan perjanjian pampas an perang ditandatangani, Perdana Menteri Kishi Nobosuke mengirimkan seorang pengusaha terkemuka, Kobayashi Ataru dan juga sebagai penasehat khusus dalam penelitian kondisi ekonomi Negara-negara Asia. Sekebalinya Kobayashi melaporkan kepada Kishi bahwa Japan’s Asian policy be geared toward close ties with Indonesia because of its rich natural resources.<sup>83</sup> Sementara itu, untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya kepada Amerika Serikat, Jepang merasa perlu memperbaiki hubungannya dan memperluas kehadiran Jepang di Negara-negara Asia. Potensi Indonesia sebagai pasar barang-barang industri Jepang juga kekayaan sumber-sumber alamnya tetap merupakan daya tarik terbesar bagi Jepang.<sup>84</sup>

Dari uraian di atas membuktikan bahwa latar belakang yang mendorong Jepang dalam hubungannya dengan Indonesia pada periode 1958-1966 terutama keinginannya memanfaatkan kekayaan sumber alam Indonesia. Lebih jelas lagi dengan timbulnya kritik yang cukup pedas kepada pemerintah Jepang dari sejumlah penduduk Indonesia ; dikutip Lawrence Olson :

---

<sup>82</sup> Asahi Shinbun, March 13, 1966, dalam Masashi Nishihara, *Op. cit.*, hal. 203.

<sup>83</sup> Masahi Nishihara, *Ibid.*, hal. 5.

<sup>84</sup> Masashi Nishihara, *Ibid.*, hal. 44.

“ A number of Indonesians bitterly criticized the Japanese government’s lack of interest in helping them to develop their country and believed Japan wanted Indonesia’s raw material resources and nothing else”.<sup>85</sup>

#### IV. 3. Hubungan Ekonomi Indonesia –Jepang

Hubungan ekonomi Indonesia – Jepang, selain menunjukkan keakraban hubungan kedua Negara, juga menunjukkan betapa Jepang sangat memerlukan dan berusaha memperoleh sebanyak-banyaknya sumber-sumber alam dari Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang dan impor Indonesia dari Jepang, pada periode 1958-1966, meningkat dengan mantap. Perubahan politik luar negeri Indonesia juga tercermin dalam hubungan ekonominya dengan Negara-negara asing, kecuali dengan Jepang.

Tabel 2 menunjukkan hubungan dagang Indonesia dengan beberapa Negara pada periode 1952-1970, kondisinya nampak mencerminkan hubungan politiknya sesuai dengan perubahan-perubahan politik luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Inggris, Belanda, Malaysia dan Singapura, dan juga terhadap Jepang.

Dari tabel dapat ditunjukkan, pertama bahwa baik ekspor dari Indonesia maupun impor ke Indonesia umumnya tidak meningkat pada periode itu. Hal ini dapat dikatakan merupakan akibat kebijaksanaan Presiden Sukarno yang khas, yaitu lebih mementingkan politik daripada ekonomi. Perdagangan dengan Belanda yang turun tajam antara tahun 1958 dan 1964, akibat dari kebijakan nasionalisasi ketegangan-ketegangan kedua Negara dalam masalah Irian-Barat. Penurunan hubungan dagang Indonesia dengan Inggris, Malaysia dan Singapura selama beberapa tahun setelah 1963 disebabkan oleh kebijaksanaan ‘Ganyang Malaysia’. Peningkatan hubungan dagang dengan China dan Uni Soviet selama periode Demokrasi Terpimpin (1957-1965) menunjukkan suatu tanda keakraban hubungan politik saat itu. Hubungan dagang yang relative lebih luas dengan

---

<sup>85</sup> Lawrence Olson, *op. cit.*, hal. 192.

China juga menunjukkan suatu hubungan antara Indonesia dengan China lebih akrab dari pada antara Indonesia dengan

TABEL 2  
COMPOSITION OF INDONESIA WITH SELECTED COUNTRIES  
1952 - 1970<sup>86</sup>

Year	Total Amount	Export ( in percent )					
		Japan	USA	USSR	China	UK	Holland
1952	10.652	3	25	+	++	3	21
1953	9.344	5	21	+	++	2	23
1954	9.759	6	17	+	++	5	19
1955	10.618	7	18	+	1	10	16
1956	10.054	8	16	+	1	9	19
1957	11.052	4	15	+	3	7	17
1958	8.612	4	17	+	6	13	4
1959	8.158	4	16	+	6	22	1
1960	841	4	23	3	++	11	++
1961	784	7	24	4	5	6	++
1962	682	6	14	5	5	16	++
1963	696	10	12	4	6	17	1
1964	724	17	24	3	7	3	10
1965	708	16	22	4	6	1	13
1966	679	18	20	4	1	2	14
1967	666	29	15	2	++	4	6
1968	751	23	15	2	++	1	6
1969	831	29	13	1	++	1	4
1970	1009	29	11	2	++	1	4
1952	10.806	14	17	+	++	7	13
1953	8.584	17	18	+	++	7	12
1954	7.172	22	14	+	1	5	10
1955	6.888	14	16	+	2	6	12
1956	9.799	16	16	+	4	6	11
1957	9.158	15	17	+	3	6	10
1958	5.860	14	16	+	8	5	6
1959	5.229	15	16	+	13	7	4
1960	577	16	15	+	10	8	3
1961	794	18	17	1	5	6	1

<sup>86</sup> Masashi Nishihara *Ibid.*, hal. 12 - 13.

1962	647	21	18	1	7	9	++
1963	520	17	11	3	8	8	++
1964	680	21	2	2	9	7	1
1965	695	23	9	2	14	4	3
1966	527	27	9	1	8	3	5
1967	649	28	8	1	8	3	7
1968	716	22	16	1	5	3	7
1969	697	29	19	1	6	3	5
1970	893	30	18	1	3	3	5

Export (in percent)		Total ( in percent )
Malaysia	Singapore	
3	25	80
3	22	76
4	22	73
3	20	75
3	21	77
3	27	76
4	25	73
3	23	75
7	23	71
7	21	74
9	21	76
4	15	69
++	++	64
++	++	67
++	3	62
++	10	66
4	15	66
3	16	67
2	15	64
+	2	53
+	1	55
+	1	53
+	2	52
+	1	54
+	2	52
+	2	51
+	2	57
+	2	54
++	2	50
++	2	58
++	1	48





++	++	42
++	++	55
++	++	53
++	3	58
1	4	59
++	5	68
1	5	65

@ 1952 – 1959 in millions of rps., and 1960 – 1970 in millions of \$

+ Data not available

++ Negligible

Uni Soviet, dalam kaitan ini China lebih memperoleh keuntungan dari pedagang-pedagang China di seberang, baik di Indonesia maupun di sekitar Indonesia. Hubungan dagang Indonesia – Amerika Serikat sebenarnya tidak mencerminkan hubungan politik kedua Negara, walaupun mulai tahun 1963 nampak penurunan impor Indonesia dari Amerika Serikat. Penurunan ini disebabkan oleh usaha Amerika Serikat untuk membekukan aliran barang-barangnya ke Indonesia dimana kondisi ‘anti –Amerika’ sedang meningkat di Indonesia.

Hubungan dagang Indonesia – Jepang merupakan pengecualian, berjalan dengan kestabilan yang cukup mantap dan menunjukkan kenaikan bertahap setelah tahun 1957. Bahkan selama periode Demokrasi Terpimpin ketika Indonesia- Jepang meningkat dengan mantap. Kondisi semacam ini dicapai antara Indonesia dengan Jepang. Kirannya tidak disangkal bahwa kondisi ini nampaknya sangat dipengaruhi alam dari Indonesia yang sejak dahulu dipandang sebagai pemasok bahan baku terkaya di kawasan Asia Tenggara, yang tak mungkin dilengahkan untuk dimanfaatkan.

Tabel 3 menunjukkan perubahan nilai moneter dari tahun 1947 sampai tahun 1970 dalam hubungan dagang Indonesia – Jepang, perbandingan ekspor Jepang ke Indonesia, dan juga perbandingan antara impor Jepang dan dengan total ekspor Indonesia. Perbandingan – perbandingan yang diambil dalam periode dua puluh tahun ini memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana ketergantungan yang saling menguntungkan antara kedua negara dan juga sejauh mana keinginan Jepang

untuk memanfaatkan sumber-sumber alam Indonesia, seperti dipaparkan nanti bahwa impor Jepang dari Indonesia hamper seluruhnya merupakan bahan baku. Di samping itu juga memperlihatkan pola hubungan kedua negara dimana Jepang berusaha mengeksport barang – barang pabrikannya ke Indonesia yang berarti mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial. Kecenderungan Jepang yang mulai melihat Indonesia sebagai pasar, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4, dimana ekspor Jepang ke Indonesia hamper semuanya terdiri dari barang – barang pabrikan (jadi) baik barang-barang pabrikan ringan (Light Manufacturing) maupun barang-barang pabrikan berat (Heavy goods).

TABEL 3  
TRADE INTERPEDENCY BETWEEN JAPAN AND INDONESIA  
1947 - 1970

Year	Japanese export to Indonesia
------	------------------------------

	1 (in thousands of \$)	2 Jap. Exp. (in percent)	3 Ind. Imo. (in percent)
1947	23,457	13,5	-
1948	56,764	22,0	164
1949	15,279	3,0	-
1950	46,281	5,6	-
1951	128,396	9,4	18,7
1952	59,842	4,6	14,3
1953	105,436	8,2	16,8
1954	119,715	7,3	21,7
1955	64,715	3,2	13,7
1956	76,031	3,0	15,6
1957	67,095	2,5	15,0
1958	49,056	1,7	13,6
1959	73,019	2,1	14,9
1960	110,821	2,7	16,0
1961	154,774	3,6	17,9
1962	116,305	2,3	20,8
1963	99,068	1,8	16,7
1964	122,089	11,8	21,0
1965	207,192	2,4	22,9
1966	118,615	1,2	26,8
1967	155,149	1,4	28,0
1968	146,595	1,1	21,7
1969	235,811	1,4	29,4
1970	315,780	1,6	35,3

Japanese Import from Indonesia			
4 (in thousands of \$)	5 Jap.emp. (in percent)	6 ind.exp. (in percent)	7 Trade Balance (1) - (4)
1,304	0,2	-	22,153
11,941	1,7	2,4	44,823

15,328	1,6	-	-49
13,303	1,3	-	32,978
104,557	5,2	3,2	23,833
27,495	1,3	2,6	32,347
48,848	2,6	4,5	56,588
60,385	2,5	5,8	59,330
81,156	3,2	7,4	-16,441
91,180	2,8	8,3	-15,449
56,109	1,5	3,6	1,986
37,004	1,2	3,6	12,052
56,588	1,5	3,8	16,431
71,286	1,5	4,0	39,535
86,687	1,4	7,1	68,087
92,876	1,6	6,0	23,429
104,808	1,5	9,7	-5,740
130,740	1,6	16,8	-8,651
149,282	1,8	15,9	57,910
175,505	1,8	17,8	-56,890
195,009	1,6	29,2	-39,860
251,829	1,9	22,9	-105,234
397,319	2,6	29,3	-161,508
636,553	3,3	63,5*	-320,773

\* This figure is too high owing statistical discrepancies

- Indicates the total is negligible<sup>87</sup>.

Beberapa kesimpulan dapat diambil dari Tabel 3 ini. Pertama, sampai tahun 1962 perimbangan perdagangan menguntungkan Jepang kecuali tahun 1955 dan 1956 tetapi setelah tahun 1963 perimbangan dagang kedua negara lebih menguntungkan Indonesia kecuali tahun 1965, menandakan bahwa dari pertengahan periode Demokrasi Terpimpin Jepang mengimpor dari Indonesia lebih banyak dari pada ekspor Jepang ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keadaan dimana Jepang membeli sumber – sumber alam lebih banyak dari Indonesia. Kenyataan ini membuktikan lebih lanjut akan keinginan Jepang untuk memanfaatkan hubungannya dengan Indonesia guna memperoleh sumber-sumber alam

<sup>87</sup> Sumber : Masashi Nishihara, *Ibid.*, hal. 16 – 17.

sebagai bahan baku industrinya. Kedua, peningkatan ekspor Jepang ke Indonesia, walaupun nilai tukar asing Jepang akhirnya menurun, disebabkan oleh politik perluasan kredit yen kepada Presiden Sukarno yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ikeda Hayato dan Kawashima Sijiro, wakil presiden partai yang berkuasa. Kecenderungan ini mencerminkan keinginan Jepang untuk tetap memelihara hubungan baiknya dengan Indonesia. Ketika sikap anti Barat Indonesia semakin nampak jelas, sebagian besar bangsa-bangsa Barat menarik kredit mereka, Jepang sendiri yang terus mensuplai kredit yen kepada Presiden Sukarno. Seorang pejabat tinggi pada Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MIT) menyatakan bahwa ketekunan Jepang pada tahun – tahun paling bergolak dan tidak stabil di Indonesia dimaksudkan untuk kemudahan dan pertumbuhan yang cepat dari volume perdagangan antara kedua negara pada masa post 1965<sup>88</sup>. Kenyataan itu membawa pada kesimpulan yang ke tiga, bahwa perdagangan Jepang dengan Indonesia lebih penting bagi Indonesia dan sekaligus merupakan indikasi kecenderungan Jepang untuk menjaga hubungan akrabnya dengan Indonesia guna memperoleh sumber – sumber . prosentase ekspor Jepang ke Indonesia di luar total eksportnya telah merosot sejak tahun 1950-an; selama periode Demokrasi Terpimpin ekspor Jepang ke Indonesia rata-rata hanya dua persen dan setelah 1966 ekspor ini telah merosot menjadi kurang dari 1,4 persen. Bila dilihat ekspor Jepang ke Indonesia pada tahun 1948 terdiri dari 22 persen dari total eksportnya lebih tercengang, karena hal itu memperlihatkan bahwa Jepang jauh lebih tergantung kepada Indonesia pada waktu itu dari pada periode 1950-an dan 1960-an. Juga impor Jepang dari Indonesia sekarang menduduki porsi yang sangat kecil dari total impornya, sementara impor yang sama menduduki porsi yang lebih besar dari total ekspor Indonesia, terutama sejak tahun 1963. Mulai tahun 1967 baik ekspor Jepang ke Indonesia atau impor Jepang dari Indonesia mencapai hamper 30 persen dari total perdagangan Indonesia.

Kesimpulan global dari Tabel 3 ini adalah bahwa Indonesia lebih tergantung kepada Jepang dari pada sebaliknya, dan bahwa kecenderungan ini menjadi lebih menyolok dari masa pertengahan hubungan Jepang – Indonesia pada masa pemerintahan Presiden

---

<sup>88</sup> Masashi Nishihara, *Ibid.*, hal. 15.

Sukarno. Disamping itu juga mencerminkan betapa besar keinginan Jepang memelihara hubungan baik dengan Indonesia.

Jepang membeli bahan-bahan baku dari Indonesia dan menjual hasil – hasil industrinya, pola ini merupakan bukti terwujudnya keinginan Jepang untuk memanfaatkan sumber-sumber alam Indonesia bagi industrinya, yang pada gilirannya tidak lepas dari kecenderungan menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi hasil-hasil industrinya, pola dagang ini ditunjukkan oleh Tabel 4 yang memberikan gambaran perdagangan antara kedua negara yang didasarkan pada barang-barang komoditi dari tahun 1956 sampai 1970. Salah satu komoditi impor Jepang dari Indonesia yang paling penting adalah minyak, dan seperti ditunjukkan pada Tabel 5, impor minyak mentah Jepang dari Indonesia telah meningkat setiap tahun sejak tahun 1956. Antara tahun 1956 dan 1970 nilai impor minyak Jepang dari Indonesia meningkat 17,5 kali. Jepang tergantung pada negara-negara asing sebanyak lebih dari 97 persen kebutuhan minyaknya selama periode lima belas tahun, dan lebih dari 99 persen sejak tahun 1965. Impor minyak tahunan dari Indonesia rata-rata 8,5 persen dari total impor minyaknya antara tahun 1956 dan 1970. Minyak terkadar belerang rendah dari Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri karena dapat mengurangi kadar polusi. Walaupun nilai impor minyak Jepang dari Indonesia sangat kecil bila disbanding dengan total impor minyaknya, namun melihat kebutuhan minyak yang semakin meningkat dan kualitas minyak Indonesia yang relative lebih baik tetap mendorong Jepang untuk akrab dengan Indonesia guna mengadakan eksploitasi lebih lanjut. Tabel 4 tersebut juga menunjukkan bahwa Jepang telah mengekspor barang-barang pabrikannya baik barang-barang pabrikan ringan maupun barang-barang pabrikan berat, seperti telah disinggung di depan. Kenyataan ini memperlihatkan lebih lanjut pola dagang Indonesia Jepang dimana Jepang mulai memanfaatkan potensi pasar Indonesia bagi barang-barang hasil industrinya yang pasti akan dikembangkan lebih lanjut selama-lamanya.

TABEL 4  
COMPOSITION OF COMMODITIES IN JAPANESE  
TRADE WITH INDONESIA, IN PERCENT  
1956 – 1970

Year	Export					Total
	Foodstuffs	Crudefuels	light Manuf goods	Heavy Manuf goods	Others	
1	2	3	4	5	6	7
1956	1	0	72	21	3	97
1957	0	0	68	26	4	98
1958	0	0	48	41	9	98
1959	0	0	39	53	7	99
1960	0	0	63	29	7	99
1961	0	0	34	57	9	100
1962	0	0	31	69	0	100
1963	0	0	29	71	0	100
1964	1	0	37	61	0	99
1965	1	1	38	60	0	100
1966	1	0	50	50	0	101
1967	1	1	45	53	0	100
1968	4	2	31	62	1	100

1969	1	2	22	73	1	99
1970	7	2	31	69	0	99

Year	Import				
	Foodstuffs	Rawmaterials	Mineral Fuels	Others	Total
1956	20	57	20	-	97
1957	8	52	33	-	93
1958	5	39	52	-	97
1959	2	27	63	-	92
1960	3	23	70	-	96
1961	4	18	73	1	95
1962	4	15	77	0	96
1963	5	15	80	0	100
1964	4	27	69	1	101
1965	4	39	57	1	101
1966	7	42	50	1	100
1967	8	36	55	2	101
1968	4	32	62	2	100
1969	4	33	61	2	100
1970	5	38	58	1	100



- Indicate the member is negligible<sup>89</sup>

Year	1	2	3	4	5
	Jap. Imp. Of Indon (orute petroleum) (in thousands of \$)	Total Jap. Crude oil Imp (in percent)	Total Indon Crude Oil Exp. (in percent)	Total Indon Exp. To Japan (in percent)	Jap. Dependence on Oil Imp (in percent)
1956	18,089	5,7	*	19,7	97
1957	16,846	4,0	*	25,9	98
1958	18,262	4,4	*	49,3	98
1959	34,528	6,9	*	61,0	98
1960	49,263	10,5	57,0	69,1	98
1961	61,245	11,3	45,5	70,6	98
1962	67,255	10,8	87,0	72,3	98
1963	78,822	9,9	54,9	75,2	98
1964	87,956	9,4	44,0	67,2	99
1965	84,139	8,0	48,0	56,3	99
1966	87,418	7,2	60,4	49,3	99
1967	95,413	6,5	49,6	48,9	99
1968	132,167	7,8	51,1	52,4	99
1969	207,374	10,8	53,3	52,1	99,5
1970	318,091	14,2	75,2	49,9	99,5

<sup>89</sup> Sumber : Masashi Nishihara, *Ibid.*, hal. 19.

\* Data not available<sup>90</sup>

Tabel 6 menunjukkan empat macam barang komoditi Indonesia yang diimpor oleh Jepang-bauksit, nikel, karet, dan kayu- dan menunjukkan pentingnya bagi kedua negara, baik Jepang maupun Indonesia. Antara tahun 1956 dan 1970 seluruhnya kecuali karet meningkat dalam nilai impor. Impor nikel dan kayu Jepang dari Indonesia, terutama antara tahun 1964 dan 1970, mengalami peningkatan, walaupun prosentase nikel Indonesia dalam total impor Jepang dari Indonesia tidak mengalami peningkatan di atas dua persen. Kayu yang ternyata hanya dua persen impor Jepang dari Indonesia pada tahun 1964 meningkat menjadi 28 persen pada tahun 1970. Jepang tidak memiliki bauksit dan tergantung pada sumber-sumber asing untuk seluruh kebutuhan bauksitnya. Antara tahun 1956 dan 1970 rata-rata 29,5 persen dari total impor bauksit Jepang berasal dari Indonesia, walaupun rata-rata kurang dari tiga persen dari total impor Jepang dari Indonesia. Satu saat karet alam dan minyak merupakan dua komoditi yang paling penting yang diimpor oleh Jepang dari Hindia Belanda. Namun karena produksi karet sintesis semakin meningkat, pentingnya karet alam sebagai yang diimpor Jepang mengalami kemerosotan, dan oleh sebab itu seperti ditunjukkan oleh Tabel 6 ini, impor karet alam Jepang dari Indonesia mengalami kemerosotan yang cukup drastic selama periode lima belas tahun, dari 29 persen tahun 1956 menjadi dua persen pada tahun 1970.

---

<sup>90</sup> Sumber : Nasashi Nishihara, *Ibid.*, hal. 20.

Kecuali karet alam ,bauksit, nikel, kayu dan minyak Indonesia tetap merupakan komoditi impor yang penting bagi Jepang. Sementara kepentingan antara Indonesia dan Jepang mulai bervariasi, namun pola hubungan dagang Indonesia – Jepang yang dapat digambarkan bahwa impor sumber-sumber alam dari Indonesia ditukar dengan ekspor barang-barang hasil industry, masih tetap merupakan pola hubungan yang belum akan berubah dalam waktu singkat.

TABEL 6  
 IMPORTANCE OF SELECTED INDONESIA EXPORTS TO  
 JAPAN AND INDONESIA  
 1956 – 1970

Goods	Jap. Imp. Indon (in thousands of \$)	Total Jap. Imp From Indon (in percent)	Total Jap. Imp. Of Given Goods (in percent)
Bauxite			
1956	2,489	2,7	40,8
1960	3,095	4,3	24,5
1964	5,599	4,2	30,6
1968	6,796	2,7	26,4
1970	9,249	1,5	25,2
(Average)	(5,445,6)	(3,08)	(29,50)
Nickel			
1956	*	*	*
1960	357	0,5	1,9
1964	679	0,5	1,9
1968	3,774	1,5	6,5
1970	12,091	1,9	6,9
(Average)	(4,225,3)	(0,88)	(4,60)

Natural Rubber			
1956	26,683	29,1	36,3
1960	*	*	*
1964	14,308	10,9	15,1
1968	15,700	6,2	18,8
1970	13,100	2,1	11,3
(Average)	(17,447,8)	(12,08)	(20,37)

Goods	Jap. Imp. Indon (in thousands of \$)	Total Jap. Imp From Indon (in percent)	Total Jap. Imp. Of Given Goods (in percent)
Lumber			
1956	495	0,5	0,6
1960	452	0,6	0,3
1964	2,699	22,1	0,6
1968	30,645	12,1	2,6
1970	176,411	27,7	11,2
(Average)	(42,140,4)	(8,60)	(3,06)

\*Figures not provided in official sources<sup>91</sup>.

<sup>91</sup> Sumber: Masashi Nisihara, Ibid., hal. 21.

Dari uraian hubungan ekonomi Indonesia – Jepang ini didapatkan bahwa kenyataan impor Jepang dari Indonesia hamper keseluruhannya berupa bahan-bahan baku industry yang berupa sumber-sumber alam. Kenyataan ini, setidaknya-tidaknya menjadi pendukung bukti akan keinginan Jepang memanfaatkan sumber-sumber alam Indonesia.

